

Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN: Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas

Riady Ibnu Khaldun

Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

E-mail: riadyibnu@unsulbar.ac.id

Abstract

Within few years since its establishment in 1967, ASEAN has ratified various economic policies to encourage the creation of welfare for member countries as stipulated in the ASEAN charter. One of them is the policy of implementing free trade with the aim of relaxing the flow of goods and services in the ASEAN region through a single market mechanism using the CEPT scheme. Since the establishment of ASEAN there have been various policies that have been ratified such as AFTA but their implementation has not been carried out optimally, especially in maximizing profits through these policies so it is necessary to improve related to the management of superior commodities and the development of competitiveness superior product.

Dalam kurun waktu beberapa tahun sejak berdirinya di tahun 1967, ASEAN telah meratifikasi berbagai kebijakan ekonomi guna mendorong terciptanya kesejahteraan negara anggota yang tertuang dalam piagam ASEAN. Satu di antaranya adalah kebijakan pelaksanaan free trade dengan tujuan untuk melonggarkan arus perpindahan baik barang maupun jasa di kawasan ASEAN melalui mekanisme pasar tunggal dengan menggunakan skema CEPT. Sejak didirikannya ASEAN telah terdapat berbagai kebijakan yang telah diratifikasi seperti AFTA namun pada implementasinya belum terlaksana dengan optimal khususnya dalam memaksimalkan keuntungan melalui kebijakan tersebut sehingga perlu untuk ditingkatkan terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan serta pengembangan daya saing produk unggulan yang dimiliki.

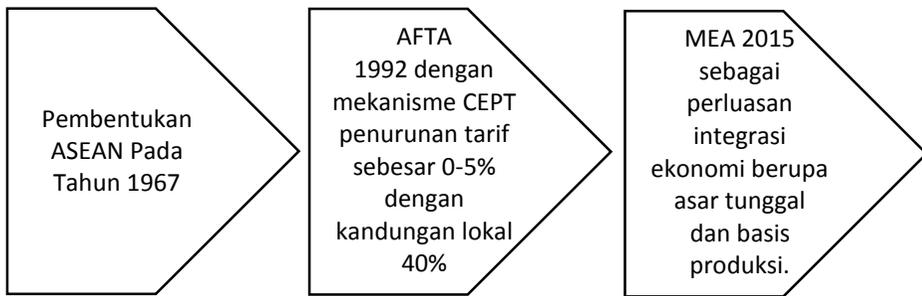
Keywords: ASEAN; Free Trade; Leading Commodities; Competitive Development of Superior Product

Latar Belakang

ASEAN merupakan akronim dari *Association of South East Asian Nations* atau yang juga dikenal sebagai persatuan sepuluh negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yakni Indonesia, Thailand,

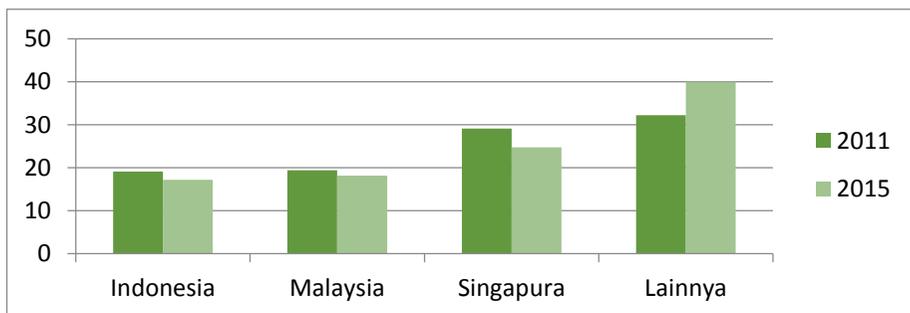
Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunai Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan Laos.¹ Pertama kali didirikan pada Tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pengusul hingga saat ini negara anggota telah terpenuhi menjadi sepuluh meskipun terdapat dua negara lainnya yang masih berstatus sebagai pengamat yaitu Timor Leste dan Papua Nugini.² Pendirian ASEAN itu sendiri dilandasi oleh beberapa dasar termasuk di dalamnya terkait dengan kesamaan letak geografis wilayah negara-negara tersebut, latar belakang yang sama, serta tujuan yang sama satu di antaranya yaitu meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Di dalam ASEAN *Chapter* (Piagam ASEAN) itu sendiri, termuat bahwa pembentukan ASEAN sejatinya untuk memberikan penjaminan pembangunan bersifat berkelanjutan, bermanfaat bagi seluruh generasi, menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak, serta kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan perwujudan cita-cita bersama ASEAN, maka diupayakan untuk dapat menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, serta sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif baik untuk perdagangan maupun investas di mana terdapat arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bersifat bebas. Didukung juga dengan terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, termasuk arus modal yang lebih besar seperti apa yang tertuang pada piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.³ Upaya tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaan liberalisasi perdagangan termasuk penyusunan kebijakan *free trade* yang diterapkan di ASEAN berupa AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement/Area*) dengan mengandalkan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dengan berbagai mekanisme penurunan tarif sebagai bentuk meminimalisir hambatan perdagangan yang dibentuk pada Tahun 1992.⁴ Tidak hanya sampai disitu untuk lebih mempererat kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN, maka dibentuk kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan tercapai pada Tahun 2015 di mana tujuan utamanya adalah menjadikan pasar bebas ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.⁵ Untuk lebih jelasnya terkait dengan penerapan kebijakan ASEAN dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Progres Kebijakan dalam ASEAN

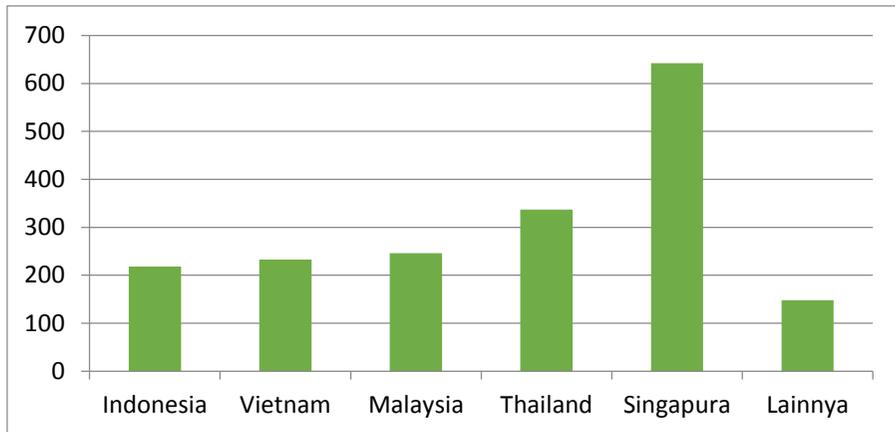
Pada bagan tersebut terlihat bahwa secara umum bagaimana perubahan kerjasama ASEAN yang dibangun semenjak dibentuk agar setiap negara anggota dapat memiliki keterkaitan semakin erat sebagai wujud pencapaian dari regionalisme di samping sebenarnya masih terdapat berbagai bentuk kebijakan-kebijakan lainnya sejalan dengan apa yang tertuang di dalam piagam. Namun, dengan hadirnya kebijakan tersebut sejatinya membuka peluang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin. Berdasarkan perbandingan data perdagangan (ekspor) di antara sesama negara ASEAN pada Tahun 2011 dan 2015 ditemukan bahwa Indonesia hanya menempati urutan ke tiga setelah Singapura dan Malaysia dengan besaran masing-masing 29,07%, 19,39%, dan 19,09% untuk Tahun 2011. Sedangkan pada Tahun 2015 Singapura sebesar 24,72%, Malaysia 18,14%, dan Indonesia sebesar 17,15%.⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Besaran Ekspor antar Negara Anggota ASEAN

Selain itu, nilai ekspor antar negara anggota ASEAN pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia hanya menempati urutan ke lima dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yaitu sebesar US\$ 218,498,866,082. Sedangkan Singapura menempati urutan pertama dengan nilai US\$ 642,294,780,546 Juta, Thailand ke dua dengan nilai US\$ 337.428.892.424,

kemudian Malaysia dan Vietnam masing-masing dengan nilai US\$ 246,919,421,716 dan US\$ 233,650,693,469.⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Nilai Ekspor antar Negara Anggota ASEAN Tahun 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya untuk mengoptimalkan kebijakan yang telah diratifikasi di dalam ASEAN itu sendiri dalam rangka meningkatkan keuntungan yang bisa didapatkan. Demikian halnya dengan, upaya yang perlu dilakukan untuk melakukan peningkatan perdagangan intra ASEAN dalam Rangka Peningkatan Ekspor Indonesia dengan memperhatikan komoditas maupun produk yang menjadi unggulan untuk dapat lebih dikembangkan.⁸ Dengan melihat posisi Indonesia dalam perdagangan antar negara ASEAN, maka hadirnya MEA sebagai wujud perluasan integrasi ekonomi sejalan dengan penerapan prinsip liberalisasi perdagangan juga patut untuk lebih dipertimbangkan terkait dengan kesempatan yang terbuka lebar untuk dimanfaatkan.⁹ Untuk itu, artikel ini akan membahas terkait dengan Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan kawasan perdagangan bebas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci terkait dengan bagaimana bentuk dinamika ekonomi-politik ASEAN serta upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memaksimalkan potensi yang tersedia dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara *online* dan *offline*, maupun sumber data lainnya yang

sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan.¹⁰

Kerangka Konseptual

Regionalisme dan Integrasi Ekonomi ASEAN

Berbicara tentang kawasan merupakan bentuk pengelompokan wilayah berdasarkan letak geografis di samping masih terdapat beberapa definisi lainnya.¹¹ Secara sederhana ketika berbicara tentang regionalisme maka akan dihadapkan pada pembagian dua definisi yakni berdasarkan kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang secara geografis berdekatan, serta berdasarkan faktor non-geografis di mana berwujud upaya peningkatan level ekonomi dan aktivitas politik di antara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis.¹² Lebih lanjut, dalam melakukan klasifikasi terhadap regionalisme itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam empat kriteria yakni¹³: 1) geografis, mengelompokkan negara berdasarkan letak wilayahnya; 2) politik, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau orientasi politik; 3) ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi bisa berupa negara yang sedang berkembang atau terbelakang; serta 4) transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan baik pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk maupun barang dan jasa.

Demikian halnya dengan ASEAN sebagai perhimpunan negara-negara yang tertelak di wilayah yang sama yakni di Kawasan Asia Tenggara pembentukannya sebagai wujud penerapan regionalisme yang beralaskan kerjasama guna mencapai apa yang ditujukan secara bersama seperti yang tertuang di dalam piagam ASEAN berupa dasar pembentukan dari kepentingan-kepentingan bersama. Pendirian ASEAN ditujukan untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan usaha-usaha kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan di mana terdapat tiga tujuan utama yaitu sebagai forum untuk resolusi atas perbedaan-perbedaan intra-regional, untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan, serta melakukan promosi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui program-program kerjasama yang dilakukan dalam bentuk penerapan integrasi ekonomi ASEAN.¹⁴

Satu di antara beberapa kerjasama erat yang dibangun dalam ASEAN yakni pembentukan kebijakan integrasi ekonomi dengan tujuan menciptakan pasar

tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas agar dapat mendorong terciptanya kesejahteraan kepada seluruh negara anggota. Mengingat integrasi ekonomi merupakan bentuk kebijakan secara bersama yang diterapkan untuk meminimalisir berbagai bentuk hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota yang bersepakat dengan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena setiap negara akan berspesialisasi sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Integrasi ekonomi ASEAN tersebut kemudian diterapkan dalam bentuk pembentukan AFTA pada Tahun 1992 dengan mekanisme CEPT penurunan tarif sebesar 0-5% dengan kandungan lokal 40% dan dilanjutkan dengan MEA 2015 sebagai perluasan integrasi ekonomi berupa asar tunggal dan basis produksi.¹⁵

Liberalisasi Perdagangan melalui ASEAN *Free Trade Agreement*

Upaya untuk mengikis seluruh hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif merupakan satu dari beberapa tujuan dalam liberalisasi perdagangan.¹⁶ Dampak yang diberikan dengan berkurangnya berbagai hambatan akan meningkatkan alur perpindahan barang dari satu negara ke negara yang lain. Adapun teori dasar dalam liberalisasi perdagangan yakni Teori Perdagangan Heckscher-Ohlin yang menyatakan bahwa perdagangan internasional terbentuk dari adanya perbedaan faktor produksi dari setiap negara di mana negara yang mempunyai faktor produksi yang relatif lebih banyak atau murah akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang dihasilkannya, sedangkan negara yang mempunyai faktor produksi yang relatif lebih sedikit atau mahal akan mengimpor barang tertentu.¹⁷ Sejalan dengan liberalisasi perdagangan, maka akan mendorong terjadinya peningkatan perdagangan antar setiap negara di mana masing-masing negara juga akan mengembangkan spesialisasi dan efisiensi berbasis keunggulan dan daya saing yang dimiliki.¹⁸

ASEAN telah menerapkan konsep liberalisasi perdagangan melalui kebijakan AFTA atau kebijakan kawasan perdagangan bebas antar negara-negara anggota melalui mekanisme CEPT untuk secara bersama-sama menentukan tahapan dalam penurunan tarif dalam perdagangan dan berbagai hambatan lainnya dalam perdagangan tersebut. AFTA hadir untuk mendorong

peningkatan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN agar dapat selaras dengan upaya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Tidak hanya AFTA, kemudian melalui MEA juga dibentuk sebagai tujuan akhir dari proses integrasi ekonomi kawasan tersebut dengan harapan dapat terciptanya pasar tunggal dan basis produk, kawasan yang sangat kompetitif, dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan terintegrasi penuh ke dalam ekonomi global.¹⁹

Pembahasan

Dinamika adalah perubahan yang terjadi dan dilakukan untuk harapan yang ingin dicapai, seperti halnya ASEAN maka terdapat dinamika ekonomi-politik di dalamnya yakni perubahan yang ditetapkan melalui berbagai kebijakan seperti integrasi ekonomi yang disepakati dalam rangka untuk mencapai tujuan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Pada awalnya, ASEAN dibentuk pada Tahun 1967 di Bangkok setelah itu negara-negara anggota menganggap bahwa perlu untuk membangun kerjasama yang lebih erat satu di antaranya dengan menyepakati AFTA pada sidang KTT ASEAN ke-empat di Singapura pada Tahun 1992 bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas agar mendorong peningkatan kesejahteraan kepada seluruh negara anggota.²⁰

Dalam mewujudkan terciptanya perdagangan bebas dalam ASEAN maka ditetapkan skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) sebagai cara untuk menerapkan bentuk tarif preferensi yang secara efektif sama di kawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi di luar ASEAN. Secara umum dapat dipahami bahwa CEPT merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif (tariff) dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih erat juga ditetapkan adanya MEA dalam rangka menciptakan pasar bebas ASEAN sebagai pasar tunggal.²¹

Dengan proses dinamika tersebut, maka saat ini telah terbuka peluang yang besar terhadap pasar bebar yang perlu untuk dioptimalisasi. Melihat kembali pada data yang tersedia menunjukkan bahwa perbandingan besaran ekspor di antara negara-negara ASEAN baik pada Tahun 2011 dan 2015 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada urutan ke tiga di bawah Malaysia dan Singapura. Termasuk juga dengan besaran nilai ekspor pada Tahun 2018, Indonesia masih berada pada urutan ke lima di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura sehingga dapat dipahami bahwa Indonesia belum mengoptimalkan dengan baik terkait dengan peluang yang tersedia. Untuk itu, sesuai dengan konsep liberalisasi perdagangan yang menyatakan bahwa sepatutnya masing-masing negara berupaya untuk melakukan spesialisasi

terhadap keunggulannya masing-masing agar dapat memaksimalkan peluang yang ada pada pasar yang tersedia. Sejatinya, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tahapan untuk dapat menyiapkan diri dalam kebijakan kawasan perdagangan bebas yang diterapkan di ASEAN seperti²²: 1) melakukan penguatan daya saing ekonomi; 2) beberapa program untuk mendorong masyarakat agar aktif mengkonsumsi produk domestik; 3) melakukan peningkatan terhadap sektor-sektor usaha yang potensi; 4) melakukan perbaikan sarana, prasarana, infrastruktur pendukung, termasuk juga kualitas sumber daya manusia sebagai modal penting dalam menghadapi situasi integrasi ekonomi ASEAN; serta 5) melakukan reformasi sistem pemerintah yang jauh lebih baik agar dapat mendukung percepatan dalam optimalisasi kebijakan kawasan perdagangan bebas yang tetap ditetapkan. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan bagi setiap negara anggota ASEAN dengan penerapan integrasi ekonomi yang lebih erat membuka peluang besar bagi setiap negara tersebut, maka perlu upaya oleh Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan keuntungan dalam kebijakan kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah dengan melakukan klasifikasi terhadap berbagai jenis produk atau komoditas yang menjadi unggulan. Selain itu, juga perlu untuk melakukan peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia yang dimiliki agar dapat jauh lebih kompetitif di tengah pasar bebas ASEAN.

Kesimpulan

Dalam kurun beberapa tahun sejak masa berdirinya ASEAN pada Tahun 1967 sampai sekarang telah terdapat berbagai kebijakan ekonomi guna mendorong terciptanya kesejahteraan negara anggota yang tertuang di dalam piagam ASEAN. Satu diantaranya adalah kebijakan pelaksanaan *free trade* dengan tujuan untuk melonggarkan arus perpindahan baik barang maupun jasa di kawasan ASEAN melalui mekanisme pasar tunggal dengan menggunakan skema CEPT. Sejak didirikannya, ASEAN telah terdapat berbagai kebijakan yang telah diratifikasi seperti AFTA, namun pada implementasinya belum terlaksana dengan optimal khususnya dalam memaksimalkan keuntungan melalui kebijakan tersebut sehingga perlu untuk ditingkatkan terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan serta pengembangan daya saing produk unggulan yang dimiliki.

Endnote

¹ asean.org, *Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara*, diakses dari <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf> pada tanggal 05 Juni 2022

- ² Rizki Roza, *Dukungan Indonesia Terhadap Keanggotaan Timor Leste di ASEAN, Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, Volume X, Nomor 13/1/Puslit/Juli/2018
- ³ asean.org, *Op.cit.*
- ⁴ Ardi Muhammad Qadafi Abidin, *Integrasi Ekonomi Regional Dalam Asean Free Trade Area*, Jurnal Education and development, Volume 7 Nomor 4, November 2019
- ⁵ Abdul Kadir Arno, 2015, *Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Muamalah, Volume V Nomor 2, Desember 2015
- ⁶ Kementerian Perdagangan, 2016, *Analisis Peningkatan Perdagangan Intra ASEAN dalam Rangka Peningkatan Ekspor Indonesia*, Laporan Akhir, 2-3
- ⁷ Databoks.Katadata.co.id, 2019, *Di ASEAN, Ekspor Barang dan Jasa Indonesia Urutan Kelima*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/di-asean-ekspor-barang-dan-jasa-indonesia-urutan-kelima> pada 05 Juni 2022
- ⁸ Kementerian Perdagangan, 2016. *Op.cit.*
- ⁹ Sulfitri Husain, *Perdagangan Bebas Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN di Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Volume 2 Nomor 1, Maret-Juni 2022
- ¹⁰ Burhan Bungin, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- ¹¹ Yustika Citra Mahendra, *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security)*, Jurnal Transformasi Global, Volume 3 Nomor 1, 2017.
- ¹² Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner, *The New Wave of Regionalism, International Organization Journal*, Volume 53 Issue 3, 1999, 589-627
- ¹³ Coulombis, Theodore A. 1990. *Introduction to international relations: power and justice* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall)
- ¹⁴ asean.org, *Op.cit.*
- ¹⁵ Kementerian Perdagangan, 2015, *Peluang dan Tantangan Pasar Indonesia Pasar Bebas ASEAN*, Warta Ekspor Ditjen PEN/WRT/04/1/2015 edisi Januari, diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/7551442304774.pdf pada tanggal 05 Juni 2022.
- ¹⁶ Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, dan Sri H. Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 22 Nomor 2, Desember 2004, 75 – 88
- ¹⁷ Acharya, S, 2015. *Trade Liberalization*. In: Hölscher, J., Tomann, H. (eds) *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics* (London: Palgrave Macmillan).
- ¹⁸ Sulthon Sjahril Sabaruddin, *Dampak Liberalisasi Perdagangan Ri-China Terhadap Perubahan Perdagangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (Smart Model) Dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume XVII No. 3, Desember 2014, 33-54
- ¹⁹ Kementerian Perdagangan, 2016, *Op.cit.*
- ²⁰ Sobar Sukmana, *Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area)*, Pakuan Law Review Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 103-120
- ²¹ Ardi Muhammad Qadafi Abidin, *Op.cit.*
- ²² Kementerian Perdagangan, 2015, *Op.cit.*

Daftar Referensi

-
- Acharya, S. *Trade Liberalization*. In: Hölscher, J., Tomann, H. (eds) *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics*. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- Asean.org. “*Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara*”, dalam <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf> pada tanggal 05 Juni 2022.
- Ardi Muhammar Qadafi Abidin. “*Integrasi Ekonomi Regional Dalam Asean Free Trade Area*.” *Jurnal Education and development*, Volume 7 Nomor 4, November 2019
- Abdul Kadir Arno. “*Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*”. *Jurnal Muamalah*, Volume V Nomor 2, Desember 2015
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Coulombis, Theodore A. *Introduction to international relations: power and justice*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1990.
- Databoks.Katadata.co.id. 2019. “*Di ASEAN, Ekspor Barang dan Jasa Indonesia Urutan Kelima*.” Dilihat 05 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/di-asean-ekspor-barang-dan-jasa-indonesia-urutan-kelima>
- Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner. *The New Wave of Regionalism, International Organization Journal*, Volume 53 Issue 3, 1999, 589-627
- Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, dan Sri H. Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 22 Nomor 2, Desember 2004, 75 – 88
- Kementerian Perdagangan, 2016, *Analisis Peningkatan Perdagangan Intra ASEAN dalam Rangka Peningkatan Ekspor Indonesia*, Laporan Akhir, 2-3
- Kementerian Perdagangan. 2015. “Peluang dan Tantangan Pasar Indonesia Pasar Bebas ASEAN Warta Ekspor Ditjen PEN/WRT/04/1/2015 edisi Januari.” Dilihat 05 Juni 2022
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/7551442304774.pdf
- Rizki Roza. *Dukungan Indonesia Terhadap Keanggotaan Timor Leste di ASEAN, Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, Volume X, Nomor 13/1/Puslit/Juli/2018

Sulfitri Husain. *Perdagangan Bebas Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN di Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Volume 2 Nomor 1, Maret-Juni 2022

Sulthon Sjahril Sabaruddin. *Dampak Liberalisasi Perdagangan Ri-China Terhadap Perubahan Perdagangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (Smart Model) Dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume XVII No. 3, Desember 2014, 33-54

Sobar Sukmana. *Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area)*, Pakuan Law Review Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 103-120

Yustika Citra Mahendra. *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security)*, Jurnal Transformasi Global, Volume 3 Nomor 1, 2017.